

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ditetapkannya Undang-Undang No.25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berakibat terjadinya perubahan yang mendasar bagi perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional, regional dan daerah. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa setelah 3 bulan sejak pelantikan kepala daerah terpilih diharuskan untuk menyusun RPJM Daerah untuk masa bakti 5 tahunan. Sebagai penjabaran dari RPJM Daerah sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, SKPD melakukan penyempurnaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra SKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen teknis dalam tataran operasional, Renstra SKPD disusun sebagai upaya untuk mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerah dalam menghadapi berbagai tantangan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Temanggung yang sejahtera, sesuai Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018.

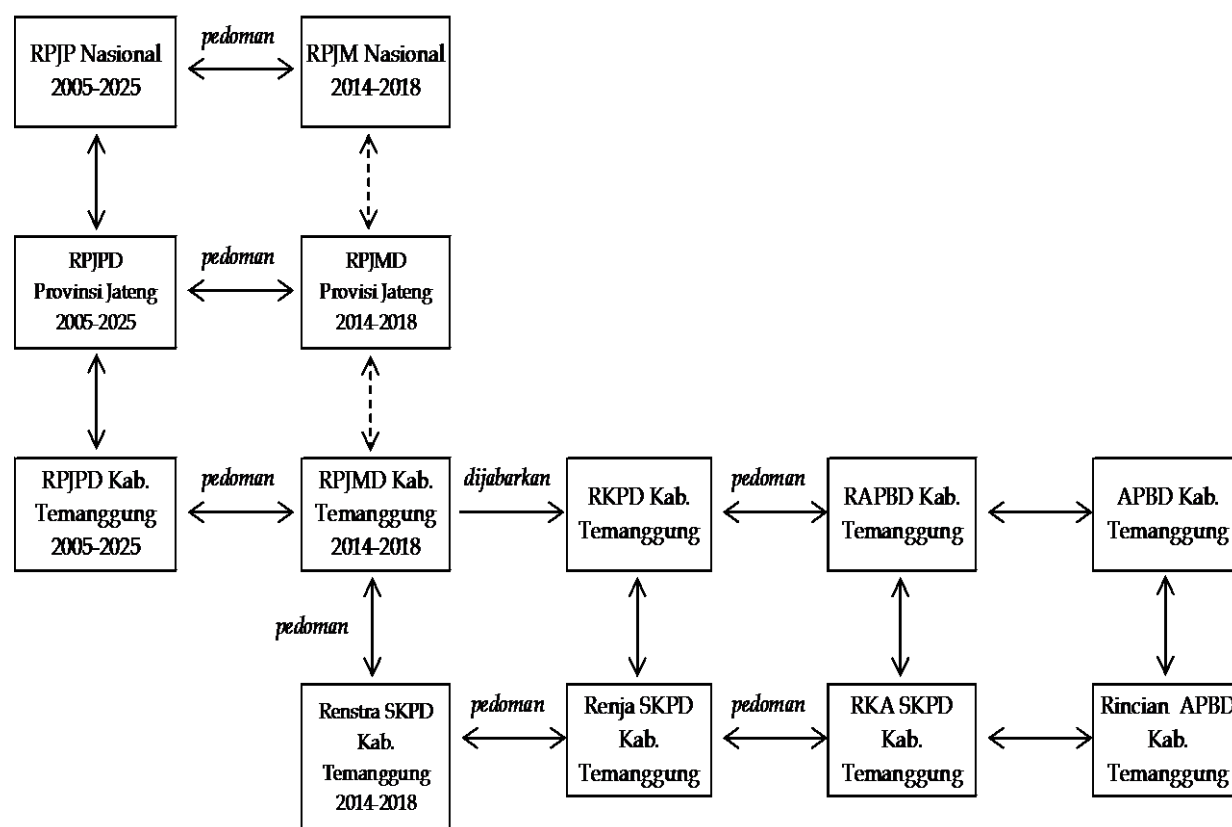
Rencana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung merupakan dokumen yang memuat kebijakan-kebijakan dengan sasaran yang masih bersifat makro kabupaten, untuk itu setiap SKPD menyusun Rencana Strategis sebagai penjabaran yang bersifat dokumen operasional 5 tahunan sesuai dengan urusan yang diampu.

Renstra Badan Pelaksana Penyuluhan memiliki peranan penting bagi semua Stakeholder lingkup pertanian dalam arti luas, karena merupakan pedoman yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun. Diharapkan para pelaku pembangunan lainnya dapat lebih mudah untuk saling mensinergikan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Temanggung.

Selanjutnya Rensta Badan Pelaksana Penyuluhan akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen operasional tahunan yaitu

dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD), yang juga mengacu atau berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun sebagai pedoman perencanaan tahunan pemerintah kabupaten. Selanjutnya Renja akan dipergunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Badan Pelaksana Penyuluhan, yang dipergunakan sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan dinas.

Dokumen-dokumen perencanaan seperti : Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010-2014, RPJP Propinsi Jawa Tengah 2005-2025, RPJM Propinsi Jawa Tengah, RPJM Kabupaten Temanggung 2013-2018 dan Renstra Badan Pelaksana Penyuluhan 2013-2018 merupakan dokumen yang saling berkaitan. Selanjutnya, keterkaitan Dokumen Renstra dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1.1. Diagram Keterkaitan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Setelah ditetapkan, Renstra Badan Pelaksana Penyuluhan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pelaksana Penyuluhan yang menjadi dasar atau acuan penentuan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan. Renja Badan Pelaksana Penyuluhan merupakan salah satu materi yang

akan dibahas pada musrenbang setiap tahun, untuk diselaraskan dengan aspirasi masyarakat dalam rangka penyempurnaan bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Renstra SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2030;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Badan Pelaksana Penyuluhan 2013 - 2018 ini adalah sebagai acuan bagi dinas dalam merencanakan dan mengembangkan langkah-langkah strategi guna meningkatkan tugas pokok dan fungsi Badan, sebagai penjabaran dari RPJM Daerah, sedangkan tujuannya adalah :

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan tentang perencanaan;
2. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi aparat pemerintah daerah dan *stakeholder* terkait dengan pembangunan pertanian dalam rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan Badan Pelaksana Penyuluhan yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten;
3. Menjabarkan tentang gambaran umum penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sekarang dan yang ingin dicapai pada lima tahun ke depan sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi SKPD;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Pelaksana Penyuluhan serta pihak terkait dalam memahami dan menilai arah kebijakan,

program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana strategis Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Temanggung ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya
- 2.3. Kinerja Pelayanan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian /Lembaga dan Renstra Propinsi
- 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi Badan Pelaksana Penyuluhan
- 4.2. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Bapeluh
- 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPELUH KABUPATEN TEMANGGUNG

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Dasar hukum pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Temanggung adalah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15).

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Temanggung, Badan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan dan program penyuluhan yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;
2. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme tatakerja, dan metode penyuluhan;
3. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
4. Pelaksanaan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;
5. Menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
6. Pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Swadaya dan Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
7. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang penyuluhan;
8. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pelaksana Penyuluhan memiliki 2 (dua) bidang, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

2.1.1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi koordinasi perencanaan, penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian. Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut di atas Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Pengelolaan urusan perencanaan dan pelaporan bidang kesekretariatan;
2. Pengoordinasian penyusunan, pengolahan, dan pelayanan data;
3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang;
4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTB;
5. Pengoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
6. Pengelolaan urusan keuangan;
7. Pengelolaan urusan umum dan kepegawaian; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2.1.2. Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan penyuluhan;
2. Perumusan rencana pengembangan dan kerjasama penyuluhan;
3. Perumusan instrument penilaian kinerja penyuluh;
4. Pelaksanaan monitoring dan bimbingan penyelenggaraan dan kerjasama penyuluhan;

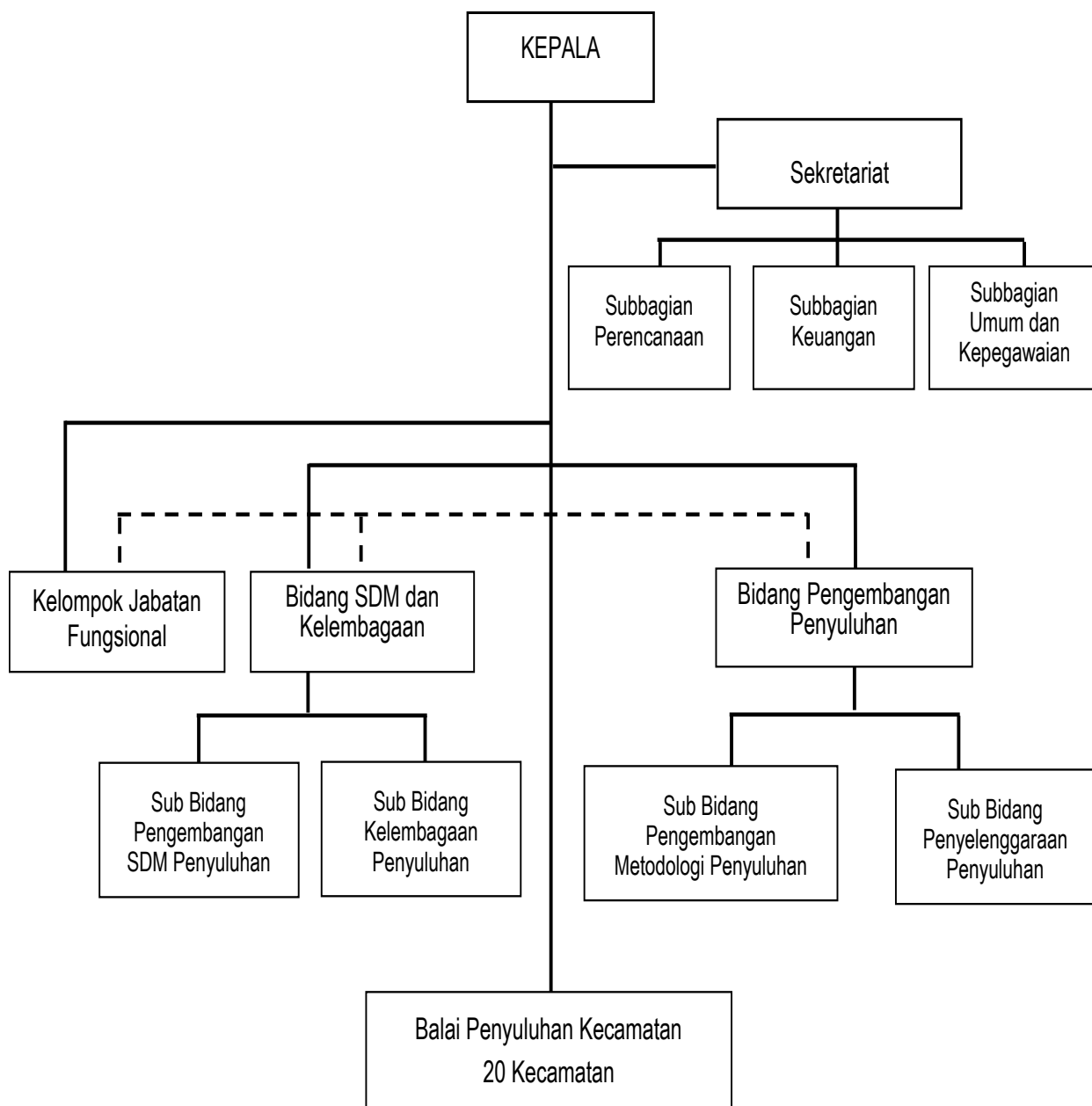
5. Koordinasi dengan dinas instansi/lembaga lain penyelenggara pembangunan bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan;
6. Pengembangan kelembagaan petani;
7. Pengembangan fasilitasi kemitraan usaha tani pelaku utama dan pelaku usaha;
8. Koordinasi kelembagaan dengan Balai Penyuluhan;
9. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan penyuluhan;
10. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

2.1.3. Bidang Pengembangan Penyuluhan

Bidang Pengembangan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di Bidang pengembangan penyuluhan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengembangan Penyuluhan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis pengembangan penyuluhan;
2. Perumusan rencana pengembangan penyuluhan;
3. Penyusunan perencanaan penyuluhan yang terintegrasi dengan programapenyuluhan;
4. Penyusunan mekanisme kerja dan metode penyuluhan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pelaku urama dan pelaku usaha;
5. Pelaksanaan pertemuan dengan penyuluh dan pelaku utama sesuai dengan kebutuhan;
6. Pelaksanaan pembentukan forum, jaringan, dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
7. Pelaksanaan kegiatan rembug, pertemuan teknis, lokakarya lapangan, serta temu lapang pelaku utama dan pelaku usaha;
8. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian kegiatan pengembangan penyuluhan.
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Berikut ini adalah struktur organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Temanggung :



Gambar 2.1. Struktur Organisasi dan Tata Laksana Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Temanggung

2.2 Sumber Daya

2.2.1. Sumber Daya SKPD

Untuk menjalankan tugas dan fungsi Bapeluh maka dibutuhkan dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana poenunjang kinerja yang memadai. Kondisi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada di Bapeluh dapat digambarkan melalui Tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Kondisi Sumber Daya Manusia Bapeluh Kabupaten Temanggung Tahun 2014

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	%
1	2	3	4
	Kondisi pegawai berdasarkan:		
1	Kualifikasi Pendidikan		
	a SMA	6	6,06
	b D-I	1	1,01
	c Sarjana Muda (D-III)	22	22,22
	d S-1 dan D-IV	67	67,68
	e S-2	3	3,03
	Jumlah	99	100,00
2	Pangkat/Golongan Ruang		
	a Gol I	0	0,00
	b Gol II	18	18,18
	c Gol III	67	67,68
	d Gol IV	14	14,14
	Jumlah	99	100,00
3	Jabatan		
	a Eselon II	1	1,01
	b Eselon III	3	3,03
	c Eselon IV	6	6,06
	d Eselon V	0	0,00
	e Jabatan Fungsional	81	81,82
	f Jabatan Fungsional Umum	8	8,08
	Jumlah	99	100,00
	JUMLAH PNS	99	
	JUMLAH NON PNS (THL-TBPP)	112	

Sumber : Bapeluh Kabupaten Temanggung Tahun 2014

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa Bapeluh belum didukung dengan kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi, walaupun jika dilihat dari sisi kualitas maka sudah dapat dikatakan

mencukupi dimana diketahui bahwa 93 % personil di Bapeluh telah berpendidikan minimal Diploma III.

Adapun dukungan sarana dan prasarana yang ada di Bapeluh dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana Bapeluh Kabupaten Temanggung Tahun 2014

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah	16	Bidang	-
b.	Gedung	20	Gedung	Baik
c.	Alat-alat angkutan			
	- Kendaraan roda dua	79	Unit	Baik
	- Kendaraan roda empat	2	Unit	Baik
	- Kendaraan roda empat	1	Unit	Rusak berat
d.	Alat-alat perkantoran			
	- Komputer	8	Unit	Baik
	- Notebook	18	Unit	Baik
	- Printer	6	Unit	Baik
	- LCD Proyektor	16	Unit	Baik
	- Wireless	6	Unit	Baik
	- Mesin ketik	2	Unit	Baik

Sumber : Bapeluh Kabupaten Temanggung Tahun 2014

2.2.2. Sumber Daya Alam

Kabupaten Temanggung memiliki luas wilayah 870,65 km² (87.065 Ha) yang secara administratif terbagi ke dalam 20 Kecamatan dengan 289 jumlah desa/kelurahan yang terdiri dari 1.556 dusun/lingkungan.

Wilayah Kabupaten Temanggung sebagian besar merupakan dataran dengan ketinggian 500 – 1.450 m di atas permukaan laut, dengan keadaan tanah sekitar 50% dataran tinggi dan 50 % dataran rendah.

Tabel 2.3. Hubungan Kelas Ketinggian dengan Luas Penyebaran

No	Kelas Ketinggian (dpl m)	Luas (Ha)	%
1	0 - 500	8.468	10,24
2	500 - 750	36.194	43,78
3	750 - 1000	20.879	24,33
4	1000 - 1500	11.469	13,87
5	> 1500	6.429	7,78
	Jumlah	82.675	100,00

Sumber: Temanggung Dalam Angka 2013.

Berdasarkan Tabel 2.3. dapat diketahui bahwa kelas ketinggian tempat yang paling luas adalah elevasi antara 500 – 750 meter (36.194 Ha atau 43,78%) yang terletak pada bagian tengah dan bagian utara timur laut Kabupaten Temanggung. Wilayah yang mempunyai elevasi rendah 0 – 500 m (8.468 Ha atau 10,24%) yang terletak di Kecamatan Temanggung, Tembarak, Pringsurat, Kandangan, Jumo dan Candiroto. Wilayah dengan elevasi di atas 750 meter, terdapat menyebar pada seluruh wilayah Kabupaten Temanggung.

Sebagian besar lahan di wilayah Kabupaten Temanggung merupakan lahan tegalan (32,27% dari luas wilayah), sedangkan penggunaan untuk sawah sebesar 23,68%. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4. Penggunaan Lahan di Kabupaten Temanggung

No.	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Sawah Pengairan teknis	4.641	5,33
2.	Sawah Pengairan setengah teknis	8.538	9,80
3.	Sawah Pengairan sederhana PU	2.989	3,43
4.	Sawah Pengairan Sederhana Non PU	3.525	4,04
5.	Sawah tadah hujan	941	1,08
6.	Bangunan/Pekarangan	9.274	10,65
7.	Tegalan	28.093	32,27
8.	Kolam	31	0,04
9.	Hutan rakyat/negara	16.117	18,51
10.	Perkebunan	10.816	12,42
11.	Lain-lain	2.100	2,41
	JUMLAH	87.065	100,00

Sumber: Temanggung Dalam Angka 2013.

Kabupaten Temanggung memiliki 488 daerah irigasi (DI) yang mampu mengairi sawah seluas 16.258,82 Ha yang tersebar di 228 Desa (13 kecamatan). Hal ini menunjukkan bahwa 78,79% sawah di Kabupaten Temanggung telah tercukupi kebutuhan irigasinya. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5. Daerah Irigasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2013

N0	DAS	SUB DAS	SUB SUB DAS	SUNGAI, MATA AIR	DAERAH IRIGASI (DI)	AREAL SAWAH (Ha)	JUMLAH DESA	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Progo	Galeh	Brangkongan	4 Sungai	26	945,47	17	Bansari, Kledung, Parakan, Kedu
2	Progo	Galeh	Datar	7 Sungai	29	1.273,75	18	Bansari, Parakan, Kedu, Jumo, Ngadirejo
3	Progo	Progo Hulu	Deres	4 Sungai 3 Mata air	23	1.009,29	16	Ngadirejo, Jumo
4	Progo	Progo Hulu	Guntur	3 Sungai 7 Mata air	27	1.142,45	14	Ngadirejo, Jumo, Parakan, Kedu
7	Progo	Progo Hulu	Hulu progo	14 Sungai 6 Mata air	53	1.481,87	27	Ngadirejo, Candiroto, Jumo, Gemawang, Kranggan
6	Progo	Murung	Mandang	8 Sungai 1 Mata air	19	852,30	10	Kranggan, Kaloran
8	Progo	Murung	Murung	3 Sungai 2 Mata air	11	635,00	9	Kranggan, Pringsurat
9	Progo	Elo	Elo	2 Sungai	4	352,00	6	Pringsurat
10	Progo	Grobok	Grobok	10 Sungai 6 Mata air	29	917,00	11	Kandangan, Kaloran
11	Progo	Tingal	Mlereng	3 Sungai	13	613,12	7	Kandangan, Kaloran
12	Progo	Tingal	Tingal	8 Sungai 1 Mata air	24	819,50	9	Kranggan, Kaloran
13	Progo	Tingal	Tingal	11 Sungai 1 Mata air	38	1.405,92	16	Kandangan, Kaloran, Kranggan
14	Bodri	Lutut	Lutut	8 Sungai 5 Mata air	57	834,70	13	Wonoboyo, Candiroto
15	Bodri	Lutut	Trocoh	11 Sungai 13 Mata air	35	748,00	13	Bejen, Candiroto, Wonoboyo
16	Bodri	Lutut	Pupu	9 Sungai 15 Mata air	30	467,53	8	Candiroto, Gemawang
17	Bodri	Logung	Logung	7 Sungai 5 Mata air	20	425,00	10	Bejen
18	Bodri	Logung	Pupu	9 Sungai 2 Mata air	30	2.087,92	8	Candiroto, Gemawang
17	Bodri	Putih	Putih	6 Sungai 7 Mata air	14	241,00	8	Gemawang, Kandangan
Jumlah				125 Sungai	488	16.258,82	228	13 Kecamatan
				74 Mata air				

Sumber : Dintanbunhut Kab. Temanggung, 2013.

Berdasarkan tingkat kekritisian lahan diketahui bahwa dari total luas hutan di luar kawasan sebesar 75.556,27 Ha (yang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya) sebanyak 26.581,76 Ha dinyatakan kritis tahun 2004. Disebabkan karena ada pelimpahan kewenangan penanganan kawasan DAS Bodri ke ke BP DAS Serayu Opak Progo mulai tahun 2013.

Tabel 2.6. Luas Lahan Kritis di Kabupaten Temanggung Tahun 2013

DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			LUAS KLASIFIKASI KEKRITISIAN LAHAN (Ha)				
			Kritis	Agak Kritis	Potensial Kritis	Tidak Kritis	Jumlah
PROGO	Dalam Kawasan	HL	-	-	3.148,31	-	3.148,31
		HP	-	38,47	159,11	-	197,58
		HPT	-	703,43	262,29	-	965,72
		<i>Jumlah I</i>	-	741,90	3.569,71	-	4.311,61
	Luar Kawasan	KB	560,14	8.416,84	16.113,12	20.277,38	45.367,48
		KL	368,42	2.342,40	5.136,26	894,37	8.741,45
		<i>Jumlah II</i>	928,56	10.759,24	21.249,38	21.171,75	54.108,93
Jumlah I+II			928,56	11.501,14	24.819,09	21.171,75	58.420,54
SERAYU	Dalam Kawasan	HL	-	100,56	45,26	96,32	242,14
		HP	-	-	-	-	-
		HPT	-	114,84	-	-	114,84
		<i>Jumlah I</i>	-	215,40	45,26	96,32	356,98
	Luar Kawasan	KB	2.278,28	5.742,35	1.690,73	1.144,17	10.855,53
		KL	-	120,93	-	-	120,93
		<i>Jumlah II</i>	2.278,28	5.863,28	1.690,73	1.144,17	10.976,46
Jumlah I+II			2.278,28	6.078,68	1.735,99	1.240,49	11.333,44
BODRI	Dalam Kawasan	HL	-	-	311,92	-	311,92
		HP	-	5.325,82	1.382,37	402,52	7.110,71
		HPT	516,36	2.008,81	372,36	-	2.897,53
		<i>Jumlah I</i>	516,36	7.334,63	2.066,65	402,52	10.320,16
	Luar Kawasan	KB	-	-	-	-	-
		KL	2.310,24	4.442,16	3.718,48	-	10.470,88
		<i>Jumlah II</i>	2.310,24	4.442,16	3.718,48	-	10.470,88
Jumlah I+II			2.826,60	11.776,79	5.785,13	402,52	20.791,04
Jumlah Dalam Kawasan			516,36	8.291,93	5.681,62	498,84	14.988,75
Jumlah Luar Kawasan			5.517,08	21.064,68	26.658,59	22.315,92	75.556,27
JUMLAH TOTAL			6.033,44	29.356,61	32.340,21	22.814,76	90.545,02

Sumber : BP DAS Opak Progo, 2013.

Keterangan :

HL : Hutan Lindung

KB : Kawasan Budidaya

HP : Hutan Produksi

KL : Kawasan Lindung

HPT : Hutan Produksi Terbatas

2.2.3. Petani dan Kelembagaan Petani

Keberadaan kelompok tani sebagai wadah berkumpulnya petani menjadi hal yang sangat penting, karena akan mempermudah untuk memberdayakan petani sesuai dengan arahan kebijakan pembangunan pertanian dalam arti luas.

Tabel 2.7. Kondisi Kelembagaan Kelompok Tani di Kabupaten Temanggung

No	Kecamatan	Jmlh Desa	Jmlh Kelompok	Kelas Kelompok			
				Pemula	Lanjut	Madya	Utama
1	Wonobojo	13	93	52	40	1	0
2	Jumo	13	61	7	52	2	0
3	Ngadirejo	20	94	57	34	2	1
4	Bansari	13	72	59	13	0	0
5	Kedu	14	70	9	60	1	0
6	Candiroto	14	67	57	10	0	0
7	Kandangan	16	116	76	32	8	0
8	Selopampang	12	71	64	7	0	0
9	Tembarak	13	54	50	4	0	0
10	Tretep	11	35	23	10	2	0
11	Tlogomluyo	12	46	31	15	0	0
12	Kaloran	14	116	50	55	11	0
13	Bulu	19	69	60	9	0	0
14	Kranggan	13	112	82	28	2	0
15	Parakan	16	55	6	47	2	0
16	Kledung	13	37	24	13	0	0
17	Gemawang	10	119	71	44	4	0
18	Temanggung	25	87	53	34	0	0
19	Pringsurat	14	95	62	27	5	1
20	Bejen	14	71	54	17	0	0
Jumlah		289	1.540	953	545	40	2

Sumber : Bapeluh Kabupaten Temanggung Tahun 2014

Di samping kelembagaan kelompok tani, terdapat juga lembaga petani yang lain yaitu Kelompok Petani Tebu Rakyat (KPTR), Asosiasi Petani Eksportir Kopi (APEKI), Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), kelompok Gabungan P3A dan organisasi P3A, 20 Kelompok KTNA tingkat Kecamatan dan 1 Kelompok KTNA tingkat Kabupaten, dan HKTI sebanyak 1 unit.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Hasil capaian kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan Bapeluh Kabupaten Temanggung 2009-2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapuluh Kabupaten Temanggung Tahun 2009 – 2013

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Frekuensi Penyuluhan Pertanian				289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	100	100	100	100	100
2	Peningkatan Cakupan Penyuluh Pertanian/ Gapoktan				3	3	1 - 2	1 - 2	1 - 2	3	3	1 - 2	1 - 2	1 - 2	100	100	100	100	100
3	Pembangunan Gedung BP3K				3	4	2	2	2	3	4	2	3	1	100	100	100	150	100
4	Pemberdayaan Petani Pelaku Agribisnis				40	40	40	60	60	40	40	40	60	60	100	100	100	100	100
5	Peningkatan Kelas Kelompok Tani				344	110	110	110	110	344	110	110	110	110	100	100	100	100	100
6	Peningkatan Peran Kelembagaan Tani				344	110	110	110	110	344	110	110	110	110	100	100	100	100	100
7	Peningkatan Jumlah Gapoktan				255	34	0	0	0	255	34	0	0	0	100	100	0	0	100
8	Tersedianya akses permodalan bagi petani				50	50	50	50	53	57	39	74	31	42	114	78	150	62	79,25

Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bapeluh Kabupaten Temanggung Tahun 2009 – 2013

Uraian	Anggaran pada tahun ke -					Realisasi anggaran pada tahun ke -					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke- (%)					Rata - rata Pertumbuhan (%)	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	anggaran	realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Anggaran Bapeluh	1.846.297.500	1.235.433.500	1.216.012.800	1.119.777.000	2.183.487.500	1.605.150.397	1.099.064.091	1.162.116.680	1.034.550.227	1.894.409.739	86,94	88,96	95,57	92,39	86,76	10 - 20	10 - 20

Dari tabel diatas terlihat rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun 2009 – 2013 terlihat cukup stabil hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran di Bapeluh

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bapeluh

Rencana strategis Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Temanggung selain mengacu pada visi misi kepala daerah juga mengacu pada rentra Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Provinsi Jawa Tengah, BPPSDM Pertanian, BP2SDM Kehutanan dan BPSDM Perikanan.

Program dan kegiatan yang ditargetkan selama 5 (lima) tahun ke depan ini dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, kreatif, inovatif dan berwawasan global sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya empat sukses pembangunan pertanian, yaitu:

- 1) Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan;
- 2) Peningkatan diversifikasi pangan;
- 3) Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor;
- 4) Peningkatan kesejahteraan petani dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan antisipasi perubahan iklim serta mendukung reformasi birokrasi

Program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan juga diupayakan untuk mendukung kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yaitu Indonesia menjadi penghasil produk perikanan terbesar tahun 2013 menuju industrialisasi perikanan berbasis *Blue Economy*. Sasaran strategis pembangunan kelautan perikanan diupayakan dengan:

- 1) Memperkuat kelembagaan dan SDM secara terintegrasi;
- 2) Mengelola sumber daya kelautan perikanan yang berkelanjutan;
- 3) Meningkatkan produktifitas dan daya saing berbasis pengolahan;
- 4) Memperkuat akses pasar domestik dan internasional.

Program dan kegiatan pada sektor kehutanan untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu meningkatkan pemberdayaan kelembagaan dan perekonomian masyarakat skitar hutan melalui upaya peningkatan kapasitas SDM penyuluh, peningkatan ketrampilan masyarakat skitar hutan, pengembangan materi penyuluhan kehutanan dan penguatan kelembagaan. Program dan kegiatan ini juga mendukung kebijakan prioritas dari kementerian kehutanan yaitu:

- 1) Pemantapan kawasan hutan;
- 2) Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS;
- 3) Pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan;
- 4) Konservasi keanekaragaman hayati;

- 5) Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan;
- 6) Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan;
- 7) Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan;
- 8) Penguatan kelembagaan kehutanan.

Harapannya terdapat sinergitas dalam pelaksanaan program penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian, perikanan dan kehutanan antara daerah dan pusat.

Berdasarkan uraian di atas, maka tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Bapeluh sebagai berikut :

- 1) Peningkatan peran Bapeluh dalam pemberdayaan masyarakat sasaran;
- 2) Jumlah penyuluh yang fluktuatif sehingga diperlukan optimalisasi peran penyuluh melalui peningkatan kompetensi;
- 3) Pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu sarana penyuluhan;
- 4) Peningkatan sinergitas dan koordinasi kelembagaan penyuluhan dari tingkat pusat sampai daerah.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bapeluh

Permasalahan yang dihadapi sektor pertanian dibedakan menjadi permasalahan umum sektor pertanian dan permasalahan yang terkait dengan SDM pertanian. Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Temanggung merupakan salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang tugas dan fungsinya di sub pertanian. Guna mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Temanggung, maka dipetakan permasalahan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Bapeluh Kabupaten Temanggung

Aspek kajian	Capaian / kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
Optimalisasi peran balai penyuluhan dan pembentukan posluhdes	Telah terbentuk 20 balai penyuluhan kecamatan dan 79 pos penyuluhan desa (posluhdes)	Balai penyuluhan kecamatan dapat menjadi pusat penyebaran teknologi dan informasi	Belum semua Balai Penyuluh Kecamatan mempunyai lahan percontohan	Keterlibatan penyuluh swadaya, KTNA, Kelompok tani dalam proses	Sarana prasarana belum menunjang optimalisasi balai penyuluhan
Fasilitasi peningkatan kapasitas tenaga penyuluh	Kapasitas penyuluh perlu ditingkatkan	Terlaksananya diseminasi teknologi terapan kepada petani	Belum optimalnya proses diseminasi informasi dan teknologi	Penyelenggaraan diklat tergantung pada lembaga diklat pertanian, perikanan, kehutanan	Pelatihan bagi penyuluh PNS, THL, swadaya kurang
Optimalisasi pelaksanaan program penyuluhan	Programa penyuluhan tersusun tiap tahun baik tingkat desa, kecamatan, kabupaten	penyuluhan sesuai kebutuhan petani dan berpedoman pada program penyuluhan	Terbatasnya jumlah penyuluh pertanian, perikanan, kehutanan	Masih lemahnya koordinasi dengan Dinas teknis lingkup pertanian arti luas	Koordinasi di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa yang aktual dan berkelanjutan

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsinya, maka beberapa faktor kunci yang bisa diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Temanggung yang cukup luas.
- 2) Keterbatasan sumber pendanaan sektor penyuluhan menjadi titik krusial untuk mengembangkan program/kegiatan yang efektif dan efisien.
- 3) Harus jelasnya target/sasaran program/kegiatan sehingga tidak terjadi salah sasaran.
- 4) Peningkatan penanganan lahan kritis di wilayah Kabupaten Temanggung untuk dapat lebih dimanfaatkan penggunaannya.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Visi pembangunan penyuluhan merupakan koridor utama yang mengawal kesinergisan dan perjalanan sektor penyuluhan menuju kondisi yang dicita-citakan. Misi adalah ungkapan eksistensi sebuah organisasi yang dijabarkan dalam bentuk rangkaian kalimat dalam rangka mencapai visi.

Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kabupaten Temanggung dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Temanggung.

Visi :

**“TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS
BERWAWASAN LINGKUNGAN, BERMASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA,
DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN
YANG BERSIH”**

Daerah agraris berwawasan lingkungan merupakan sebuah kondisi daerah yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi daerah yang secara ekonomi bertumpu pada sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian daerah dan tumpuan kehidupan masyarakat. Sebagai sektor penggerak perekonomian daerah maka pengembangan sektor pertanian tetap dengan memperhatikan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Masyarakat Agamis merupakan sebuah kondisi masyarakat yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi dimana selain terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat

Kabupaten Temanggung, namun juga terpenuhinya kebutuhan rohani yang ditandai dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai dengan pemahaman, penghayatan, pengamalan ajaran agama, dan didukung dengan kebebasan menjalankan ajaran agama, serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung selalu tidak meninggalkan norma-norma agama.

Berbudaya merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi masyarakat yang memiliki budaya sehat, budaya peduli pendidikan, budaya kebersihan lingkungan khususnya tempat tinggal dan lingkungan perumahan, dan budaya peduli atas lingkungan sosial kemasyarakatan dan kebudayaan yang berkembang di lingkungan sekitarnya.

Sejahtera merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi masyarakat dimana seluruh individu masyarakat dapat mencukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, dan religius. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pemerintahan yang bersih merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi pelaksanaan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sesuai dengan arah pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga terwujud pemerintahan yang bersih di semua aspek pelaksanaan pemerintahan.

MISI

Untuk mewujudkan Visi Daerah Kabupaten Temanggung di atas, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dilakukan dalam 6 (enam) Misi Daerah, yaitu:

1. Mewujudkan Pertanian Moderen yang Berwawasan Lingkungan;
2. Mewujudkan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera;
3. Mewujudkan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan;
4. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal;
5. Mewujudkan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat;

6. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut di atas, maka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Tahun 2014 - 2018 harus memiliki langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika yang sama.

Disamping hal tersebut, pelaksanaan pembangunan juga memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari: keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan. Keterkaitan diartikan sebagai keterkaitan antar wilayah, antar sector, antar tingkat pemerintahan, dan antar pemangku kepentingan pembangunan. Keseimbangan diartikan sebagai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Keadilan diartikan sebagai keadilan antar kelompok masyarakat dan generasi.

Untuk menyatukan langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika para pemangku kepentingan pembangunan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Temanggung menetapkan sebuah tekad pembangunan yang dituangkan dalam sebuah Motto yaitu:

“BERSAMA MEMBANGUN TEMANGGUNG”

Sebuah tekad yang mengandung pemahaman bahwa pembangunan daerah merupakan tanggung-jawab bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Menelaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun mendatang dan untuk mengidentifikasi faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bapeluh Kabupaten Temanggung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Telaahan sebagaimana dimaksud tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong pelayanan Bapeluh Terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi-1: Mewujudkan Peningkatan Pertanian Modern yang Berwawasan Lingkungan			
A.	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	1. Terbatasnya SDM Penyuluh pertanian, perikanan, kehutanan	Cakupan penyuluh PNS dan THL-TBPP terhadap desa membina 2 – 3 desa	Adanya penyuluh swadaya
B.	Program Pemberdayaan Petani	1. Terbatasnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usahaterkait dengan masih rendahnya rata-rata pendidikan	Pendidikan rata-rata masih rendah	Tersedianya kesempatan Diklat Pelatihan di tingkat provinsi, pusat (kemitraan/ usaha)
		2. Keterbatasan modal usaha bagi pelaku utama dan akses ke lembaga ekonomi	CSR perusahaan belum dapat dimanfaatkan secara optimal (kredit usaha terbatas)	Terbukanya peluang kebijakan penyaluran dana CSR/perbankan
		3. Terbatasnya pengetahuan pelaku utama dalam penguasaan agribisnis berorientasi pasar	Terbatasnya dana dan pola magang kepada pelaku utama dan pelaku (ex: Feati dan magang Jepang)	Pola magang masih dikembangkan oleh pusat
		4. Terbatasnya fasilitasi kepada pelaku utama melalui pola magang	Terbatasnya dana dan pola magang kepada pelaku utama dan pelaku (ex: Feati dan magang Jepang)	Pola magang masih dikembangkan oleh pusat
		5. Semakin sempitnya rata-rata pemilikan lahan usaha pelaku utama (\pm 0,3 Ha/orang)	Industrialisasi dan alih fungsi lahan usaha tani makin tidak efisien	Revisi/review kebijakan tata ruang dan perijinan
		6. Semakin sulitnya ketersediaan tenaga kerja khususnya generasi muda/ usia muda di sektor pertanian	Usaha tani tidak efisien dan lemahnya nilai tawar usaha sektor pertanian	Mekanisasi pertanian

No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		7. Sarana produksi masih sulit bagi petani dalam mekanisme pasar bebas dan mahal (pupuk, pestisida dan saprodi lainnya) butuh pendampingan intens dari penyuluh	Regulasi dan ketersediaan di tingkat provinsi dan distributor sampai dengan pengecer sangat ketat	- Pasar bebas - Penyuluh pendamping

3.3. Telaahan Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah

Permasalahan pelayanan Bapeluh Kabupaten Temanggung berdasarkan sasaran rencana strategis Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 beserta faktor penghambat dan pendorong yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi tersebut pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan Badan Pelaksana Penyuluhan Berdasarkan Renstra Sekretariat Bakorluh Provinsi Jateng Beserta Faktor penghambat dan Pendorong

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya penyuluh yang mempunyai kemampuan dan ketrampilan sesuai dengan bidang keahlian	1. Keterbatasan jumlah penyuluh PNS, dan keterbatasan kapasitas penyuluh dalam mendampingi petani/kelompok tani	Penyuluh banyak memasuki masa pensiun,	65% penyuluh berpendidikan S1
		2. Belum optimalnya pembinaan penyuluh swadaya	Kurangnya kapasitas penyuluh swadaya	Telah terbentuk Penyuluh swadaya sejumlah 222 org
2	Terwujudnya kelembagaan penyuluhan di kecamatan dan desa	1. Belum optimalnya fungsi Balai Penyuluhan dan Posluhdes	Kurangnya sarpras dan BOP Balai Penyuluhan	Telah terbangun BP di 20 kec dan 60 unit posluhdes ex P3TIP
		2. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan petani	Kurangnya sarpras dan BOP Pembinaan kelembagaan petani	Telah terbentuk kelembagaan petani 1540 unit
3	Terwujudnya penyusunan program penyuluhan tingkat kecamatan dan desa	1. Program penyuluhan yang telah dituangkan dalam Rencana kerja tahunan penyuluh (RKTP) aplikasi di lapangan belum optimal	Kurangnya pendampingan dalam penyusunan program penyuluhan dan monev kegiatan penyuluhan	Bapeluh telah mendapatkan program P3TIP tahun 2007-2013

	Terwujudnya penyelenggaraan penyuluhan melalui metode dan materi penyuluhan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan potensi wilayah	1. Belum optimalnya penyelenggaraan penyuluhan melalui metode dan materi penyuluhan sesuai perkembangan teknologi dan potensi wilayah	Kurangnya pengetahuan penyuluh dlm penyusunan materi penyuluhan sesuai perkembangan teknologi dan potensi wilayah	Telah terbentuk xyber extension, e-petani, jaringan internet cukup bagus
4	Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai	1. Sarana dan prasarana penyuluh belum memadai	Kurangnya sinkronisasi program antar SKPD lingkup pertanian	Tersedia DAK, Pertanian, Perikanan & kehutanan

3.4. Penentuan Isu – Isu Strategis

Pembangunan perekonomian di Kabupaten Temanggung tentunya sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian propinsi, dan nasional. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat beberapa faktor, eksternal dan internal maupun faktor penghambat dan pendorong yang akan sangat mempengaruhi status pembangunan perekonomian di Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun 2018.

Isu – isu strategis pelayanan Bapeluh Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 dilakukan oleh Bapeluh dengan menggunakan metoda pembobotan, dirumuskan isu isu strategis pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapeluh dengan melibatkan semua Kepala Bidang, semua Kepala Sub Bidang, pejabat fungsional dan beberapa staf. Isu – isu strategis yang disepakati adalah yang berdasarkan sebagai berikut :

- 1) Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran renstra
- 2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Bapeluh
- 3) Berdampak besar pada petani/publik
- 4) Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah
- 5) Kemudahan untuk menangani
- 6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan

Berdasarkan pertimbangan pembobotan tersebut, diperoleh hasil isu strategis sebagai berikut :

- 1) Belum meningkatnya kapasitas penyuluh dan petani dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian serta pengembangan pertanian yang berwawasan lingkungan;

- 2) Belum meningkatnya kelembagaan petani yang handal dan mandiri dalam pengembangan ekonomi kerakyatan;
- 3) Belum meningkatnya penyelenggaraan penyuluhan dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian yang berwawasan lingkungan;
- 4) Belum meningkatnya diseminasi teknologi dan informasi pertanian yang berwawasan lingkungan;
- 5) Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan petani.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Visi Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Temanggung adalah :

“TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PENYULUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN MENUJU MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG SEJAHTERA”

Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- 1) *Penyelenggaraan penyuluhan yang berkualitas* artinya penyelenggaraan penyuluhan yang mengikuti dan memperhatikan perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat/petani dan orientasi pada pasar global;
- 2) *Penyelenggaraan penyuluhan yang berwawasan lingkungan* artinya penyelenggaraan penyuluhan yang memperhatikan potensi lokal, sumber daya lingkungan sosial, ekonomi, budaya dan alam serta sustainable (keberlanjutan) dan rejuvenilable (peremajaan) sumber daya;
- 3) *Masyarakat Temanggung yang sejahtera* artinya menuju terwujudnya masyarakat Temanggung yang meningkat pendapatannya, memberikan kenyamanan dan keadilan serta sejahtera secara materiil dan spirituil.

Untuk mewujudkan visi di atas, Badan Pelaksana Penyuluhan menetapkan Misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kapasitas penyuluh dan petani;
- 2) Meningkatkan kelembagaan petani yang handal dan mandiri;
- 3) Meningkatkan penyelenggaraan penyuluhan yang akuntabel;
- 4) Meningkatkan deseminasi teknologi dan informasi pertanian.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Sasaran merupakan tindakan yang akan dilakukan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat spesifik.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL 2013	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KETERANGAN
					1	2	3	4	5	
1	Meningkatkan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan Diversifikasi Produk Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Meningkatnya Penyelenggaraan Penyuluhan	Jumlah materi penyuluhan yang dipublikasikan (kali/th)	0	5	5	7	10	10	
			Jumlah peningkatan kapasitas SDM penyuluh (org/th)	2	3	3	3	3	3	
			Rasio jumlah kelompok tani maju dengan jumlah total kelompok tani 100 % (%)	7,142857 143	8,051 9 4805 2	8,051 9 48052	8,0519 48052	8,0519 48052	8,051 9 4805 2	
			Jumlah peningkatan kapasitas SDM petani (org/th)	0	2.480	4.960	7.440	9.920	12.40 0	
			Cakupan pertumbuhan dan peningkatan kapasitas Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) (%)	27,34	35,99	46,37	58,46	72,32	87,89	
			Jumlah pertumbuhan dan peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Petani (unit/desa/th)	1	10	25	40	55	70	

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi Pembangunan Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Temanggung berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2. Tujuan, sasaran, Strategi dan kebijakan Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Temanggung

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
VISI : TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PENYULUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN MENUJU MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG SEJAHTERA			
MISI 1. Meningkatkan kapasitas penyuluh dan petani;			
Meningkatkan kapasitas penyuluh PNS/kontrak	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan penyuluh PNS/Kontrak	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan penyuluh PNS/Kontrak	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan penyuluh PNS/Kontrak
	Meningkatnya kapasitas penyuluh PNS/Kontrak	Peningkatan kapasitas penyuluh PNS/Kontrak	Pemasaran kapasitas penyuluh PNS/Kontrak
	Meningkatnya profesionalisme penyuluh PNS/Kontrak	Peningkatan profesionalisme penyuluh PNS/Kontrak	Meningkatkan profesionalisme penyuluh PNS/Kontrak
Meningkatkan kapsitas penyuluh swadaya	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan penyuluh Swadaya	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan penyuluh Swadaya	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan penyuluh Swadaya
	Meningkatnya kapasitas penyuluh Swadaya	Peningkatan kapasitas penyuluh Swadaya	Pemasaran kapasitas penyuluh Swadaya
Meningkatkan Kapasitas petani	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani
	Meningkatnya kapasitas petani	Peningkatan kapsitas petani	Meningkatkan kapasitas petani
MISI 2. Meningkatkan kelembagaan petani yang handal dan mandiri;			
Meningkatkan peran dan fungsi Kelembagaan penyuluhan	Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan penyuluhan tingkat kecamatan	Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan penyuluhan tingkat kecamatan	Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyuluhan tingkat kecamatan
	Meningkatnya peran fungsi kelembagaan penyuluhan tingkat desa	Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan penyuluhan tingkat desa	Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyuluhan tingkat desa
Meningkatkan peran dan fungsi Kelembagaan petani	Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan petani	Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan petani	Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan petani
	Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan ekonomi petani	Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan ekonomi petani	Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan ekonomi petani
MISI 3. Meningkatkan penyelenggaraan penyuluhan yang akuntabel;			
Meningkatkan penyusunan programa penyuluhan	Meningkatnya penyusunan programa penyuluhan tingkat kecamatan	Peningkatan penyusunan programa penyuluhan tingkat kecamatan	Meningkatkan penyusunan programa penyuluhan tingkat kecamatan
	Meningkatnya penyusunan programa penyuluhan tingkat desa	Peningkatan penyusunan programa penyuluhan tingkat desa	Meningkatkan penyusunan programa penyuluhan tingkat desa
Meningkatkan pengembangan metode penyuluhan yang akuntabel	Meningkatnya Pengembangan metode penyuluhan yang akuntabel	Peningkatan penyusunan programa penyuluhan yang akuntabel	Meningkatkan Pengembangan metode penyuluhan yang akuntabel
Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan	Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan
Meningkatkan penyelenggaraan penyuluhan	Meningkatnya penyelenggaraan penyuluhan yang akuntabel	Peningkatan penyelenggaraan penyuluhan yang akuntabel	Meningkatkan penyelenggaraan penyuluhan yang akuntabel

MISI 4. Meningkatkan diseminasi teknologi dan informasi pertanian.			
Meningkatkan pengembangan diseminasi teknologi dan informasi pertanian	Meningkatnya pengembangan diseminasi teknologi dan informasi pertanian melalui media cetak	Peningkatan pengembangan diseminasi teknologi dan informasi pertanian melalui media cetak	Meningkatkan pengembangan diseminasi teknologi dan informasi pertanian melalui media cetak
	Meningkatnya pengembangan diseminasi teknologi dan informasi pertanian melalui media elektronika	Peningkatan pengembangan diseminasi teknologi dan informasi pertanian melalui media elektronika	Meningkatkan pengembangan diseminasi teknologi dan informasi pertanian melalui media elektronika

BAB V
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Program Pembangunan Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Temanggung tahun 2013-2018 telah disesuaikan dengan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2013-2018 Misi 1 yaitu Mewujudkan Peningkatan Pertanian Modern yang Berwawasan Lingkungan. Sebagai upaya untuk mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Periode 2013-2018, maka ditetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu :

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan/operasional
 - c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - d. Penyediaan barang cetak dan penggandaan
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - f. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
 - g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
 - h. Penyediaan makan dan minuman
 - i. Rapat – rapat koordinasidan konsultasi keluar daerah
 - j. Rapat – rapat koordinasidan konsultasi dalam daerah
 - k. Jasa pelayanan perkantoran
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - a. Pengadaan Perelengkapan Gedung Kantor
 - b. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - c. Pengadaan Meubelair
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 3) Program peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya/hari-hari tertentu
- 4) Program perencanaan pembangunan daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD
- 5) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

- a. Pengadaan sarana dan prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepatguna
- 6) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
 - a. Kegiatan Peningkatan Kinerja Penyuluhan
 - b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh
 - c. Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP)
- 7) Program Pemberdayaan Petani
 - a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Petani
 - b. Kegiatan Pendampingan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
 - c. Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Petani (LEP)
 - d. Replikasi Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian dan Penumbuhan Posluhdes
 - e. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani
 - f. Kegiatan Fasilitasi Diversifikasi Usaha Tani Tembakau melalui Agribisnis Komoditas Unggulan
 - g. Kegiatan Fasilitasi Pemanfaatan musuh alami untuk pengendalian hama/penyakit tanaman
 - h. Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Usaha Tani berbasis Konservasi
 - i. Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Petani di Kawasan Reklamasi
 - j. **Pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu (KPT) di lingkungan pertembakauan**
 - k. **Kegiatan Fasilitasi Penyuluhan dan Pendampingan Kelompok Tani Tembakau (kegiatan baru/perubahan2014)**

5.2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Badan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dengan indikator kinerja, sasaran dan pendanaan indikatif Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Temanggung adalah komitmen untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran RPJMD 2014 – 2018. Adapun kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Temanggung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		target	Rp	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
			A. Belanja Tidak Langsung															
			I. Belanja Gaji Pegawai															
			Belanja Gaji Pegawai	Terbayarnya gaji PNS Bapeluh	12 bl	12 bl	6.540.560.870	12 bl	7.156.587.032	12 bl	7.772.613.194	12 bl	8.388.639.356	12 bl	9.004.665.518	12 bl	9.004.665.518	
			II. Belanja Hibah Urusan Pertanian															
			Bantuan Hibah Replikasi Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi	Terlaksananya pelatihan petani secara partisipatif dalam pengelolaan usaha tani dengan berorientasi pasar	100 % 10 klp/ds	100 % 5 klp/ds	50.000.000	100 % 10 klp/ds	200.000.000	100 % 10 klp/ds	200.000.000	100 % 10 klp/ds	200.000.000	100 % 10 klp/ds	200.000.000	100 % 10 klp/ds	200.000.000	
			Bantuan Hibah Diversifikasi Usaha Tani Tembakau melalui Agribisnis Komoditas Unggulan	Peningkatan penerapan teknologi dan informasi agribisnis komoditas unggulan	100 % 14 klp	25 klp	750.000.000	25 klp	800.000.000	25 klp	800.000.000	25 klp	850.000.000	25 klp	850.000.000	25 klp	850.000.000	
			Bantuan Hibah Pemanfaatan Musuh Alami untuk Pengendalian Hama Penyakit Tanaman	Peningkatan kapasitas petani dalam pemanfaatan musuh alami utk pengendalian hama penyakit tanaman	0	5 desa	63.000.000	5 desa	64.000.000	5 desa	75.000.000	5 desa	80.000.000	5 desa	100.000.000	5 desa	100.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
			B. 1. Belanja Langsung Rutin															
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya belanja telepon, air, listrik dan internet selama 1 th	12 bl	12 bl	58.000.000	12 bl	56.360.000	12 bl	57.000.000	12 bl	62.160.000	12 bl	65.247.000	12 bl	65.247.000	
				Telepon Bapeluh (bl)		12 bl		12 bl		12 bl		12 bl		12 bl		12 bl		
				Air Bapeluh dan 20 BP Kec. (bl)		12 bl		12 bl		12 bl		12 bl		12 bl		12 bl		
				Listrik Bapeluh dan 20 BP Kec. (bl)		12 bl		12 bl		12 bl		12 bl		12 bl		12 bl		
				Internet Bapeluh (bl)		12 bl		12 bl		12 bl		12 bl		12 bl		12 bl		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan/ Operasional	Tersedianya biaya pemeliharaan, suku cadang & perijinan kendaraan dinas/ operasional selama 1 th	100% 1 mobil dan 9 roda-2	100% 2 mobil dan 9 roda-2	35.000.000	100% 2 mobil dan 9 roda-2	40.285.000	100% 2 mobil dan 12 roda-2	46.000.000	100% 2 mobil dan 12 roda-2	50.915.700	100% 2 mobil dan 12 roda-2	53.461.485	100% 2 mobil dan 12 roda-2	53.461.485	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya bahan & peralatan kebersihan serta terpenuhinya belanja retribusi	12 bl	12 bl	4.000.000	12 bl	6.000.000	12 bl	7.260.000	12 bl	7.986.000	12 bl	8.784.000	12 bl	8.784.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				kebersihan kantor (bl)													
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Bapeluh dan 20 BP Kec. (bl)	100% Bapeluh dan 20 BP Kec. 12 bl	12 bl	16.000.000	12 bl	20.700.000	12 bl	23.805.000	12 bl	27.375.000	12 bl	31.482.000	12 bl	31.482.000
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan biaya cetak dan penggandaan	12 bl	12 bl	6.000.000	12 bl	8.000.000	12 bl	8.000.000	12 bl	9.000.000	12 bl	10.000.000	12 bl	10.000.000
			Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bl	12 bl	3.000.000	12 bl	3.450.000	12 bl	3.967.000	12 bl	4.562.000	12 bl	5.247.000	12 bl	5.247.000
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 1 th		12 bl	1.800.000	12 bl	2.000.000	12 bl	2.178.000	12 bl	2.395.800	12 bl	2.635.380		2.635.380
			Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan minuman harian pegawai, jamuan rapat dan tamu selama 1 th	12 bl	12 bl	20.000.000	12 bl	22.000.000	12 bl	24.200.000	12 bl	26.620.000	12 bl	29.282.000	12 bl	29.282.000
			Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Tersedianya belanja perjalanan dinas ke luar daerah selama 1 th	12 bl	12 bl	25.000.000	12 bl	40.700.000	12 bl	42.000.000	12 bl	49.247.000	12 bl	54.171.700	12 bl	54.171.700
			Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya belanja perjalanan dinas ke dalam daerah selama	12 bl	12 bl	3.000.000	12 bl	3.300.000	12 bl	3.630.000	12 bl	3.993.000	12 bl	4.392.300	12 bl	4...392.300

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
				1 th														
			Jasa Pelayanan Perkantoran	Tersedianya upah tenaga kebersihan/ penjaga malam kantor Bapeluh dan 20 BP Kecamatan 1 tahun	12 bl	12 bl	135.050.000	12 bl	158.600.000	12 bl	158.600.000	12 bl	195.800.000	12 bl	195.800.000	12 bl	195.800.000	
			II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor di Bapeluh dan 20 Balai Penyuluhan Kecamatan	Almari besi 2 unit, filing cabinet 1 unit untuk bapeluh	Almari besi 2 unit, filing cabinet 1 unit untuk bape luh	11.450.000	Almari 5 unit untuk 5 BP Kec.	22.700.000	Almari 5 unit untuk 5 BP Kec.	24.950.000	Almari 5 unit untuk 5 BP Kec.	27.200.000	Almari 5 unit untuk 5 BP Kec.	72.275.000	Almari 20 unit untuk 20 BP Kec.	72.275.000	
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor Bapeluh dan 20 Balai Penyuluhan Kecamatan	Laptop 3 unit, LCD 2 unit untk BP Kec. Kamera 1 unit, handycam 1 unit, PC & printer untuk Bapeluh	Laptop 3 unit, printer 5 unit, wireless 1 unit untuk BP Kec.	33.760.000	Printer 5 unit, LCD & Screen 2 unit, wireless 2 unit untuk BP Kec. PC 2 unit, printer 2 unit untuk bapeluh (perema jaan)	50.500.000	Printer 5 unit, wireless 4 unit untuk BP Kec. PC 1 unit, printer 1 unit, Laptop 1 unit untuk bapeluh (perema jaan)	53.000.000	Printer 5 unit, wireless 2 unit untuk BP Kec. PC 1 unit, printer 1 unit, LCD & screen 1 unit Laptop 2 unit untuk bapeluh (perema jaan)	53.100.000	wireless 2 unit untuk BP Kec. PC 2 unit, printer 2 unit, Laptop 1 unit untuk bapeluh	42.000.000		42.000.000	
			Pengadaan Meubelair	Tersedianya meubelair kantro Bapeluh dan 20 Balai Penyuluhan Kecamatan	Kursi rapat 60 unit untk 3 BP Kec.	Kursi rapat 22 unit untk 1 BP Kec. Dan meja/ kursi kerja 3 set	14.760.000	Kursi rapat 40 unit, meja/ kursi kerja 8 set untk 2	32.800.000	Kursi rapat 20 unit, untk 1 BP Kec. meja/ kursi kerja	33.200.000	meja/ kursi kerja 16 set untk 4 BP Kec.	32.000.000	meja/ kursi kerja 16 set untk 4 BP Kec.	33.500.000	Meubelair bapeluh dan 20 BP Kec. terpenuhi	33.500.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						untuk bapeluh		BP Kec.		12 set untuk 3 BP Kec.							
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor bapeluh dan 20 Balai Penyuluhan Kecamatan	Pengecatan kantor Bapeluh	Pengecatan gedung kantor Bapeluh dan 10 BP Kec. Pengadaan trails pengaman pintu, jendela untuk 2 BP Kec.	49.000.000	Pengecatan gedung kantor 10 BP Kec. Pengadaan trails pengaman pintu, jendela untuk 3 BP Kec.	66.000.000	Pengecatan gedung kantor Bapeluh dan 10 BP Kec. Pengadaan trails pengaman pintu, jendela untuk 3 BP Kec.	71.500.000	Pengecatan gedung kantor 10 BP Kec. Pengadaan trails pengaman pintu, jendela untuk 4 BP Kec.	82.500.000	Pengecatan gedung kantor Bapeluh dan 10 BP Kec. Pengadaan trails pengaman pintu, jendela untuk 1 BP Kec.	82.500.000	Pengecatan 2 th sekali dan trails pengaman 20 BP Kecamatan terpasang	82.500.000
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor bapeluh dan 20 Balai Penyuluhan Kecamatan untuk 1 th	12 bl	12 bl	4.000.000	12 bl	16.700.000	12 bl	21.200.000	12 bl	25.200.000	12 bl	29.200.000	12 bl	29.200.000
			III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur														
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian untuk karyawan	0	115 potong	22.600.000	0	0	0	0	0	0	120 potong	26.250.000		
			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian hari tertentu untuk karyawan	0	0	0	0	0	120 potong	38.375.000	0	0	0	0		
			IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur														

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
			Penilaian Angka Kredit	Pembinaan jabatan fungsional penyuluh dan Terlaksananya penilaian angka kredit bagi jabatan fungsional khusus penyuluh	0	0	0	Tersusunnya Hasil Penilaian Angka Kredit dan Penetapan Angka Kredit (HAPAK/PAK) untuk 82 penyuluh x 2 semester	15.000.000	Tersusunnya Hasil Penilaian Angka Kredit dan Penetapan Angka Kredit (HAPAK/PAK) untuk 82 penyuluh x 2 semester	17.000.000	Tersusunnya Hasil Penilaian Angka Kredit dan Penetapan Angka Kredit (HAPAK/PAK) untuk 82 penyuluh x 2 semester	19.000.000	Tersusunnya Hasil Penilaian Angka Kredit dan Penetapan Angka Kredit (HAPAK/PAK) untuk 82 penyuluh x 2 semester	21.000.000	Tersusunnya Hasil Penilaian Angka Kredit dan Penetapan Angka Kredit (HAPAK/PAK) untuk 82 penyuluh x 2 semester	21.000.000		
Mewujudkan Peningkatan Pertanian Moderen yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan Diversifikasi Produk Pertanian, Perkebunan dan Peternakan		B. 2. Belanja Langsung Kegiatan																
			I. Program Perencanaan Pembangunan Daerah																
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD yang tepat waktu	0	0	0	12 bl	1.000.000	12 bl	1.000.000	12 bl	1.000.000	12 bl	1.000.000	12 bl	1.000.000	12 bl	1.000.000
			II. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan																
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ perkebunan Tepatguna	Tersedianya alat uji tanah sawah dan kering	11 unit PUTK/PUTS dan 8 set reagen	8 set reagen untuk tanah sawah dan kering	11.780.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			III. Program Pemberdayaan Penyuluh																

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Pertanian, Perikanan dan Kehutanan														
			Kegiatan Peningkatan Kinerja Penyuluhan	Terlaksananya kegiatan penyuluhan yang sesuai kebutuhan bagi petani/pelaku utamam/pelaku usaha dengan mengacu pada program penyuluhan	Tersusun nya Programa Penyuluhan tk. Kab. dan tk. Kec. di 20 Kec.	Tersusun nya Programa Penyuluhan tk. Kab. dan tk. Kec. di 20 Kec.	50.000.000	Tersusun nya Programa Penyuluhan tk. Kab. tk. Kec. 20 dokumen, tk. Desa 289 dokumen	191.150.000	Tersusun nya Programa Penyuluhan tk. Kab. tk. Kec. 20 dokumen, tk. Desa 289 dokumen	205.600.000	Tersusun nya Programa Penyuluhan tk. Kab. tk. Kec. 20 dokumen, tk. Desa 289 dokumen	205.600.000	Tersusun nya Programa Penyuluhan tk. Kab. tk. Kec. 20 dokumen, tk. Desa 289 dokumen	205.600.000	Tersusun nya Programa Penyuluhan tk. Kab. tk. Kec. 20 dokumen, tk. Desa 289 dokumen	205.600.000
				Jml. Dokumen Programa penyuluhan tk. Kab.(dok/th)	1	1		1		1		1		1		1	
				Jml. Dokumen Programa penyuluhan tk. Kec. (dok/th)	20	20		20		20		20		20		20	
				Jml. Dokumen Programa penyuluhan tk. Desa (dok/th)	0	289		289		289		289		289		289	
				Frekuensi pembuatan materi penyuluhan spesifik lokalita (kl/materi/th)	0	20		20		20		20		20		20	
				Frekuensi pembuatan materi penyuluhan yang dipublikasi kan tingkat nasional	0	5		5		7		10		10		10	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				(kl/materi/th)													
				Pengadaan refill reagen, Alat uji tanah	0	0	0	40		40		40		40		40	
			Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh	Tercapainya peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan		Penyuluh bapeluh dan 20 balai penyuluhan kecamatan	180.150.800	Penyuluh bapeluh dan 20 balai penyuluhan kecamatan	190.000.000	Penyuluh bapeluh dan 20 balai penyuluhan kecamatan	195.000.000	Penyuluh bapeluh dan 20 balai penyuluhan kecamatan	200.000.000	Penyuluh bapeluh dan 20 balai penyuluhan kecamatan	200.000.000	Penyuluh bapeluh dan 20 balai penyuluhan kecamatan	200.000.000
				Frekuensi Training bagi penyuluh (kali/th)	10	10		10		10		10		10		10	
				Frekuensi pertemuan Komisi Penyuluhan (kali/th)	6	6		6		6		6		6		6	
				Frekuensi pertemuan/pembinaan Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) tk. Kabupaten (kali/th)	6	6		0		0		0		0		6	
				Frekuensi pertemuan/pembinaan Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) tk. Kecamatan (kali/th)	6	6		0		0		0		0		6	
				Frekuensi pertemuan/pembinaan	4	4		0		0		0		0		4	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Pengelola P-4S (Pusat Pelatihan, Petani Swadaya) (kali/th)													
				Frekuensi pertemuan/ pembinaan Forum Wanita Tani (kali/th)	6	5		0		0		0		0		5	
				Frekuensi pertemuan/ pembinaan Penyuluh Swadaya (kali/th)	3	4		4		4		4		4		4	
				Frekuensi kepesertaan Jambore dan lomba karya Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan tk. Nasional (kali/th)	0	0		0		1		0		1		1	
				Frekuensi kepesertaan Pekan Nasional KTNA/ Pekan Daerah KTNA (PENAS, PEDDA) KTNA (kali/th)	0	1		1		1		1		1		1	
				Frekuensi penilaian/ lomba Penyuluh pertanian, perikanan, kehutanan,	1	1		1		1		1		1		1	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Penyuluh Swadaya (kali/th)													
			Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP)	Meningkatnya kinerja THL-TBPP dengan terbayarnya kekurangan honor THL-TBPP selama 2 bulan (November, Desember) (2 bl/th)	120 org THL-TBPP x 2 bl x Rp. 600.000	120 org THL-TBPP x 2 bl x Rp. 600.000	150.000.000	120 org THL-TBPP x 2 bl x Rp. 800.000	192.000.000	120 org THL-TBPP x 2 bl x Rp. 800.000	194.000.000	120 org THL-TBPP x 2 bl x Rp. 850.000	204.000.000	120 org THL-TBPP x 2 bl x Rp. 900.000	216.000.000	120 org THL-TBPP x 2 bl x Rp. 900.000	216.000.000
			IV. Program Pemberdayaan Petani														
			Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Petani	Terlaksananya peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Petani	0	0	0	Petani/poktan, gapoktan, KWT, P-4S, KTNA, Penyuluh Swadaya	175.000.000	Petani/poktan, gapoktan, KWT, P-4S, KTNA, Penyuluh Swadaya	180.000.000	Petani/poktan, gapoktan, KWT, P-4S, KTNA, Penyuluh Swadaya	190.000.000	Petani/poktan, gapoktan, KWT, P-4S, KTNA, Penyuluh Swadaya	200.000.000	Petani/poktan, gapoktan, KWT, P-4S, KTNA, Penyuluh Swadaya	200.000.000
				Persentase kelompok tani yang meningkat kelasnya (maju) dengan jumlah total kelompok tani (%/th)	7,14	8,05		8,05		8,05		8,05		8,05		8,05	
				dari kelas Pemula ke Lanjut		100		100		100		100		100		100	
				dari kelas Lanjut ke Madya		20		20		20		20		20		20	
				dari kelas Madya ke Utama		4		4		4		4		4		4	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Total jml kelompok tani		1540		1540		1540		1540		1540		1540	
				Frekuensi penilaian lomba bagi petani, penyuluh swadaya, kelompok tani, gapoktan, KWT, P-4S (kali/th)	0	0		1		1		1		1		1	
				Frekuensi pertemuan/ pembinaan Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) tk. Kabupaten (kali/th)	0	0		6		6		6		6		6	
				Frekuensi pertemuan/ pembinaan Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) tk. Kecamatan (kali/th)	0	0		6		6		6		6		6	
				Frekuensi pertemuan/ pembinaan Pengelola P-4S (Pusat Pelatihan, Petani Swadaya) (kali/th)	0	0		4		4		4		4		4	
				Frekuensi pertemuan/ pembinaan Forum Wanita	0	0		6		6		6		6		6	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Tani (kali/th)													
			Kegiatan Pendampingan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	Terfasilitasinya pembentukan dan pembinaan LKM Agrinisnis PUAP (ds/unit/th)	44	289	189.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Rasio pengembangan dana BLM PUAP dg jumlah dana yg tersalur ke gapoktan (%/th)	0	2,86		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jml pengembangan dana (Rp/th)		800.000.000		0		0		0		0		800.000.000	
				Jml dana awal (Rp milyar)		27,9 M										27,9 M	
				Terbentuknya Badan Usaha Milik Petani (BUMP) berbentuk pra koperasi/ koperasi/ asosiasi (unit/ desa/th)	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
			Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Petani (LEP)	Terlaksananya penumbuhan dan peningkatan kapasitas Lembaga Ekonomi Petani (LEP)	0	0	0		97.500.000		97.500.000		100.000.000		135.000.000		135.000.000
				Rasio pengembangan	0	0	0	3,46		3,46		3,46		3,46		13,84	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				dana BLM PUAP dg jumlah dana yg tersalur ke gapoktan (%/th)													
				Jml pengembangan dana (Rp milyar/th)	0	0	0	1,0 M		1,0 M		1,0 M		1,0 M		4,0 M	
				Jml dana awal (Rp milyar)	0	0	0	28,9 M		28,9 M		28,9 M		28,9 M		28,9 M	
				Terbentuknya Badan Usaha Milik Petani (BUMP) berbentuk pra koperasi/ koperasi/ asosiasi (unit/ desa/th)	0	0	0	15		15		15		15		60	
			Fasilitasi Replikasi Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian dan Penumbuhan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes)	Terlaskannya pembelajaran partisipatif bagi petani dalam beragri bisnis komoditas unggulan dan penumbuhan Posluhdes (unit/ desa/ th)	10	5	48.490.000	10	95.000.000	10	97.800.000	10	99.000.000	10	99.000.000	55	99.000.000
				Jumlah penumbuhan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) (unit/ desa/th)	79	25		30		35		40		45		254	
			Kegiatan Penguatan Kelembagaan	Peningkatan kapasitas petani dan	3	20	268.309.500	20	300.000.000	20	300.000.000	20	350.000.000	20	350.000.000	103	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Kelompok Tani	kelembagaan kelompok tani di kawasan pertembakauan (desa/th)													
				Jumlah Kelompok tani yang mengikuti pembelajaran	3	20		20		20		20		20		103	
				Percontohan pembelajaran (unit/ha/th)	0	4		5		5		5		5		24	
			Fasilitasi Diversifikasi Usaha Tani Tembakau melalui Agribisnis Komoditas unggulan	Peningkatan Pengetahuan, Sikap dan Perilaku petani dalam penerapan teknologi dan informasi agribisnis komoditas unggulan (kelompok/th)	14	25	64.566.000	25	80.000.000	25	80.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	139	424.566.000
				Peningkatan kapasitas SDM petani (org/th)		390		390		390		390		390			
				Terlaksananya pelatihan (org/th)		420		420		420		420		420			
				Terlaksananya temu lapang (org/th)		700		700		700		700		700			
			Fasilitasi Pemanfaatan Musuh Alami untuk Pengendalian Hama Penyakit Tanaman	Peningkatan kapasitas petani dalam pengendalian serangan hama penyakit tanaman (unit/desa/th)	1	5	6.820.000	5	7.000.000	5	7.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	26	40.820.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Sosialisasi Penanaman dan pemuliaan benih tembakau varietas kemloko (kec)	Terlaksananya sosialisasi budidaya tembakau varietas kemloko	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Usaha Berbasis Konservasi	Meningkatnya kelompok tani/ petani dalam pengelolaan usaha tani dengan berbasis konservasi lahan (poktan/ desa/th)	0	0	0	20	96.000.000	20	96.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	80	392.000.000
				Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan (kelompok/th)	0	10	0	20		20		20		20		90	
				Jumlah poktan peserta studi banding pengelolaan usah atani berbasis konservasi (lahan kritis)	0	0	0	20		20		20		20		80	
				Luas percontohan pengelolaan usaha tani berbasis konservasi (ha/unit/th)	0	0	0	2		2		2		2		8	
				Jumlah SD/MI pelaksana Kecil Menanam Dewasa Mamanen (KMDM) (SD/MI)	0	0	0	20		20		20		20		80	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Fasilitasi Pemberdayaan Petani di Kawasan Reklamasi	Terfasilitasinya pemberdayaan petani di kawasan reklamasi (desa/th)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
			Pembangunan Kawasan (KPT) di Lingkungan Pertembakauan (DBHCHT)	Peningkatan potensi lahan reklamasi Kawasan Pertanian Terpadu (%)	100	0	0	100	375.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	1000	425.000.000	100	16.000.000.000

a. Kegiatan Fasilitasi Penyuluhan dan Pendampingan Kelompok Tani Tembakau

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bapeluh dalam keberhasilan pembangunan Kabupaten Temanggung tahun 2013 - 2018. Hal ini ditunjukkan dalam setiap pencapaian indikator output setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat tercapai. Indikator kinerja Bapeluh tahun 2013 - 2018 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bapeluh pada tahun 2013 - 2018 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013 - 2018 adalah sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Temanggung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah materi penyuluhan yang dipublikasikan (kali/th)	0	5	5	7	10	10	10
2	Jumlah peningkatan kapasitas SDM penyuluh (org/th)	2	3	3	3	3	3	3
3	Rasio jumlah kelompok tani maju dengan jumlah total kelompok tani 100 % (%)	7,142857143	8,051948052	8,051948052	8,051948052	8,051948052	8,051948052	8,051948052
	Jml kelompok tani yg naik kelasnya (yg maju)	110	124	124	124	124	124	
	a. dari P ke L	100	100	100	100	100	100	
	b. dari L ke M	10	20	20	20	20	20	
	c. dari M ke U	0	4	4	4	4	4	
	Total Kelompok tani	1540	1540	1540	1540	1540	1540	
4	Jumlah peningkatan kapasitas SDM petani (org/th)	0	2.480	4.960	7.440	9.920	12.400	12.400
5	Cakupan pertumbuhan dan peningkatan kapasitas Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) (%)	27,34	35,99	46,37	58,46	72,32	87,89	87,89
	Besaran penumbuhan Posluhdes (desa/th)	79	25	30	35	40	45	254
	Jumlah desa/kelurahan	289	289	289	289	289	289	289
6	Jumlah pertumbuhan dan peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Petani (unit/desa/th)	1	10	25	40	55	70	70

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Temanggung Tahun 2013 - 2018 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 - 2018, melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah, dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Selanjutnya Renstra dijadikan pedoman bagi Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupten Temanggung dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah tahun 2013 - 2018 melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Selain itu Renstra juga menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan.

Temanggung, 10 Maret 2014

KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. MUCH AMIN AGUS PRASODJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600829 198903 1 004

alternative Tabel 3.3. (halaman 25)

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Optimalisasi peran dan kualitas kelembagaan penyuluhan di tingkat kecamatan dan desa	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas antar Balai Penyuluhan Kecamatan belum seimbang menyebabkan belum optimalnya pelayanan - Sebagian kecil saja desa yang telah terbentuk posluhdes 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih minimnya sarana penunjang yang tersedia di Balai Penyuluhan Kecamatan untuk penyuluhan - Status aset di Pemda - Masih kecilnya dana tersedia dari provinsi/pusat dan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Gedung Balai Penyuluhan Kecamatan sudah terbangun di seluruh kecamatan (20 kecamatan) - Tersedianya penyuluh THL TBPP dan penyuluh swadaya di tingkat desa
2	Peningkatan kompetensi SDM penyuluh dan pelaku utama, pelaku usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya frekuensi diklat/pelatihan bagi penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi perencanaan diklat dari provinsi/pusat ke daerah belum jelas (jenis dan kuota calon peserta) 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kuota peserta pelatihan/diklat dari pusat/provinsi - Adanya peran mitra pemerintah untuk pola magang
3	Optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang efektif, efisien dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya persamaan persepsi penjabaran peraturan perundang-undangan tentang sistem penyelenggaraan penyuluhan di kementerian pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan - Standar dan kriteria metoda serta petunjuk pelaksanaan sistem penyelenggaraan penyuluhan efektif, akuntabel, antara pusat dan daerah belum disesuaikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum diterbitkannya peraturan bersama tiga kementerian tentang sistem kerja penyelenggaraan penyuluhan (pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan) - Masih terbatasnya tingkat koordinasi antara lembaga pembina penyuluh pusat dengan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih terbuka peluang koordinasi tingkat kementerian pembina (3 kementerian yaitu Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan) - Peluang koordinasi masih terbuka antara pusat dan daerah

